



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MKRI Kukuhkan Mekar Sari sebagai Desa Konstitusi

Kalimantan Barat, 13 November 2022 – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura akan mengukuhkan Desa Mekar Sari sebagai Desa Konstitusi. Prosesi pengukuhan akan diselenggarakan pada Minggu, 13 November 2022 bertempat di Kantor Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Prosesi pengukuhan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman sekaligus menyerahkan Piagam Pengukuhan dan Surat Keputusan tentang Pengukuhan Desa Mekar Sari sebagai Desa Konstitusi. Acara Pengukuhan Desa Konstitusi ini disemarakkan dengan Pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), panggung budaya, dan lomba sadar konstitusi yang digelar Sabtu dan Minggu.

Kegiatan ini merupakan upaya Mahkamah Konstitusi melaksanakan misi meningkatkan budaya sadar berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara. Dengan mengukuhkan Desa Mekar Sari sebagai Desa Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki komitmen untuk kebersamaan warga Desa Mekar Sari untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi ke dalam perilaku dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Desa Mekar Sari dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi atas usulan dan rekomendasi Universitas Tanjungpura kepada Mahkamah Konstitusi. Desa Mekar Sari memiliki banyak keunggulan dalam pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat. Warga Desa Mekar Sari memiliki dan mempraktikkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat yang beragam, terutama secara etnis. Keberagaman tersebut sama sekali tidak menjadi hambatan bagi warga Desa Mekar Sari untuk memupuk dan memelihara kebersamaan dalam bingkai NKRI. Salah satu keunggulan lain, Desa Mekar Sari menetapkan regulasi level desa untuk mencegah pernikahan dini atau pernikahan laki-laki/perempuan yang belum cukup umur. Hal ini sangat sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia kawin bagi perempuan 16 tahun dinyatakan inkonstitusional karena diskriminatif

Desa Mekar Sari merupakan Desa Konstitusi kelima yang dikukuhkan MK setelah sebelumnya mengukuhkan Desa Galesong di Sulawesi Selatan, Kampung Wasur di Papua, Desa Bangbang di Bali, dan Nagari Pasia Laweh di Sumatera Barat (Humas MK).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id